

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN *STUNTING*

DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU

Yang diajukan oleh :

NURELISA

E051 191 049



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING
DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU**

Yang diajukan oleh:

Nurelisa

E051 191 049

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

NIP. 19601123 1986 03 2001

Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si.

NIP. 19680411 200012 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 1991 01 1 001

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU

Dipersiapkan dan disusun oleh

NURELISA

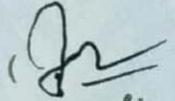
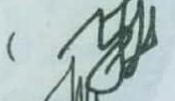
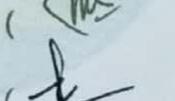
E051 191 049

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

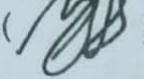
Makassar, 13 Juli 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si ()
Sekertaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M. Si ()
Anggota : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M. Si ()
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si ()

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M. Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nurelisa
NIM : E051191049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul "**Peran Pemerintah Daerah Dalam Penurunan Stunting Di Kecamatan Kabupaten Mamuju**" Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juni 2023

Yang menyatakan,



NURELISA

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

`Alhamdulillahirobbil`alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang tidak henti-hentinya peneliti panjatkan atas segala kebaikan yang tak terhingga yang telah Allah berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penurunan Stunting Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju” dengan sebaik-baiknya. Peneliti juga haturkan shalawat dan salam kepada idola seluruh ummat muslim, sang revolusioner terhebat ummat manusia, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi kita Muhammad saw.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Bapak H. Misi dan Ibu Salma selaku Ayahanda dan Ibunda Peneliti yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya

sehingga mengantarkan peneliti untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta kedua kakak peneliti, Junaedi dan A. Servina Dewi yang senantiasa memberikan dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teruntuk keponakan tercinta peneliti yakni Faizan Abqary Junaedi terima kasih karena senantiasa menghibur juga menghiasi hari-hari peneliti dengan tawa riangnya. Adapun tak lupa juga kepada nenek peneliti satu-satunya Subaeda dan keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan peneliti agar terus diberi kemudahan.

Selanjutnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penelitian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Penurunan Masalah kesehatan masyarakat salah satunya Stunting di lokasi penelitian dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengenyam

pendidikan di kampus merah tercinta.

2. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya yang telah membantu peneliti dalam pengurusan administratif selama peneliti mengenyam pendidikan di kampus merah.
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dalam pengurusan administratif hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan

kepada peneliti.

7. Seluruh informan Seluruh informan dari kabupaten Mamuju, yakni Ibu Dewi Sundari, S.Km., M.Kes (Dinas Kesehatan), Masrica, S.Km. (DPPKB), Bapak Jumardi, S.Ip. (DPPKB), Ibu Nirwana (Dinas Sosial), Bapak Samasuddin, S.Pd., M.Pd (Dinas Pendidikan), Bapak H. Lukman Sanusi, S.P, S.E, M.M (Dinas Ketahanan Pangan), Bapak Muhammad Anas (kantor Kecamatan Mamuju), Ibu Irmafani Nistaluhu (Tenaga Kesehatan Puskesmas Binanga), Ibu Radiatul Alawiyah, Amd.Gz (Tenaga Kesehatan Puskesmas Bambu), Muhammad Ishaq Hasan (Tenaga Promosi kesehatan Puskesmas Bambu), Dan masyarakat Kecamatan Mamuju yaitu Ibu Nurhidayah, Ibu Mardiana, Ibu Masdawati, Ibu Masna, Ibu Sinar, Ibu Kasmawati dan ibu Hasna yang telah banyak membantu dan memberikan waktunya bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.
8. Adikku tercinta terkasih Egidia Awalia Agustina Putri yang sedari dulu membantu dan memberikan support bahkan waktunya dalam mengejar pendidikan hingga saat ini. Kamu anak yang hebat dek.
9. Adikku tercantik Rezky Auliah yang membantu dan membersamai dalam proses penelitian, dan tidak lupa sepupuku tersayang kakak Narti, Epi, Esti, Resti, Estrid, Rindu, Safna dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.
10. Oktaviana Karim selaku pembimbing ketiga yang sekaligus *partner* dalam mengejar Ridho Allah SWT baik dunia maupun akhirat, kebersamaan dan bantuan dalam segala hal akan senantiasa peneliti

ingat, semoga Allah menjaga dan meridhai setiap langkahmu.

11. Nicky Kacitha Maksoed terkasih yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil agar peneliti lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terima kasih kepada saudari-saudari tercinta Boto'lagee, Kiky, Ayu, Yuyun dan Ija yang telah kebersamai peneliti diwaktu susah dan senang peneliti dari awal memasuki perkuliahan hingga menjalani hari-hari yang penuh hura-hara dalam kost tercinta yang akan terus dikenang oleh peneliti. Semoga kebaikan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kalian dimanapun kalian berada.
13. Anak VENO CHALLENGE tercinta yakni Alvira Rahmayanti yang senantiasa memberikan dukungan baik fisik maupun materil serta waktunya agar peneliti lebih giat dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada Nadya Manusia terunik yang turut kebersamai peneliti dalam proses perkuliahan.
14. Sahabatku Muthmainnah sya'ban, Desty Nathalia, Dewi Perwtyta, Masayu, Kurnia, Sarifah yang telah memberikan dukungan moril untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
15. Kakak Jelita dan Kakak Juwita yang senantiasa memberikan semangat dan juga sebagai panutan untuk menyelesaikan skripsi dan jadi sarjana.
16. Trio Ubur-ubur yakni Rahman Dwi Syahputra, Calvin Horman, Dan Gilang Ramadhan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

17. Adikku di kampus Anni Mujahidah Kamal yang selalu mendengarkan Keluhan Peneliti dan Memberikan dukungan moril. Serta, sahabat-sahabat seperjuangan di Unhas yakni Jumrah, Fitri Ramdani, Wahyu Akbar, dan Andi Sulfiana dan lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
18. Terakhir terimakasih kepada diriku sendiri untuk selalu bertahan, hidup ini memang berat terkadang ada hari-hari dimana semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kamu hebat karena kamu tetap mendorong dirimu untuk bertahan dan menghadapi situasi sulit tersebut. Terima kasih karena tidak pernah menyerah hingga badai berlalu. Meskipun masih banyak hal yang belum mampu kamu wujudkan, kamu sudah banyak berjuang. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti belajar, berkembang, dan melakukan banyak hal untuk impianmu. Terima kasih sudah menyadari bahwa kamu memiliki mimpi yang besar dan selalu berusaha mewujudkannya. Semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT, dan tetap bersyukur karena telah terlahir di keluarga yang hebat.

Makassar, 14 Juni 2023

Nurelisa

E051191049

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Konsep, Peran, Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	13
2.1.1. Konsep Pemerintah Daerah	13
2.1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	15
2.1.3. Peran Pemerintah Daerah.....	17
2.2. Pemerintah Daerah Dalam Penurunan Stunting	22
2.2.1. Konsep <i>Stunting</i>	22
2.2.2. Dampak <i>Stunting</i>	23
2.2.3. Faktor resiko <i>Stunting</i>	23
2.2.4. Peran Pemerintah Dalam Penurunan <i>Stunting</i>	26
2.3. Kerangka Konseptual.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Tipe Dasar Penelitian.....	31
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.3. Informan Penelitian	32

3.4.	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.	Jenis Data	34
3.6.	Fokus Penelitian.....	35
3.7.	Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		38
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1.	Kondisi Geografis	38
4.1.2.	Kondisi Demografis	40
4.1.3.	Visi, Misi, dan Motto Pemerintahan	41
4.1.4.	Struktur Keorganisasian Kecamatan Mamuju.....	43
4.2.	Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	44
4.2.1.	Peningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa	46
4.2.2.	Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.....	61
4.2.3.	Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa	77
4.2.4.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga, dan masyarakat	92
4.2.5.	Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.....	100
BAB V		112
KESIMPULAN DAN SARAN		112
5.1.	Kesimpulan	112
5.2.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN		119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Bayi dan Ibu Per Titik Pelayanan	10
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	30
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Mamuju	38
Gambar 4.2 Peta Administratif Kecamatan Mamuju	40
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Mamuju	44
Gambar 4.4 Daftar Penerima PKH	58
Gambar 4.5 Potret Anak Remaja Putri Minum Tablet Penambah Darah	71
Gambar 4.6 Kelas Bina Keluarga Balita	74
Gambar 4.7 Penyuluhan stunting Kepada Remaja Putri	75
Gambar 4.8 Data Pendampingan Calon Pengatin	87
Gambar 4.9 Kegiatan Dapur B2SA (gerakan sadar pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman)	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	32
Tabel 4.1 Persebaran Anak stunting	51
Tabel 4.2 Jumlah keluarga dengan kondisi fasilitas lingkungan kurang sehat	65
Tabel 4.3 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB)	72
Tabel 4.4 Persentase jumlah balita, Status Gizi, ASI Eksklusif, Rematri, Ibu Hamil, dan Surveilans dan Tatalaksana Gizi Buruk	80
Tabel 4.5 Data Hasil Surveilans Keluarga Berisiko Stunting	90
Tabel 4.6 Data Peserta KB Pasca Persalinan	90
Tabel 4.7 Persentasi unmeet need	91
Tabel 4.8 Jumlah pasangan usia subur yang diidentifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraannya	94
Tabel 4.9 Pasangan Usia Subur Yang Diidentifikasi Dari Program Kb	94

ABSTRAK

NURELISA, Nomor Induk Mahasiswa E051191049, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Penurunan Stunting Di Kecamatan Kabupaten Mamuju**”, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr.Hj. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi *Stunting* di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% dan pada tahun 2022 sebesar 21,6%. Meskipun mengalami penurunan tetap menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi tertinggi kedua di Indonesia dengan prevalensi *Stunting* sebesar 35% pada Tahun 2022. Sementara untuk Kabupaten Mamuju menempati urutan keempat tertinggi dengan prevalensi sebesar 33,8%. Dengan itu penelitian ini membahas terkait bagaimana peran pemerintah daerah di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dalam penurunan stunting. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan, apalagi mengingat *Stunting* merupakan masalah gizi kronis pada anak yang dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular saat dewasa nanti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam penurunan *Stunting* sesuai dengan lima (5) Pilar Strategi Nasional percepatan penurunan *Stunting* yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yakni, (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. (3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. (5) Penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset, dan inovasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah di kecamatan Mamuju dalam menjalankan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun ternyata hal itu belum sepenuhnya menurunkan prevalensi *Stunting* yang justru meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci : Peran, Pemerintah Daerah, *Stunting*

ABSTRACT

NURELISA, Student Identification Number E051191049, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**The Role of Local Government in Reducing Stunting in Mamuju District**", under the guidance of Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si as the Main Advisor and Mr. Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Counselor

In Indonesia itself, based on the results of the Indonesian Nutritional Status Survey (SSGI) the prevalence of stunting in Indonesia in 2021 is 24.4% and in 2022 it is 21.6%. Even though it has decreased, it still places West Sulawesi Province as the second highest province in Indonesia with a stunting prevalence of 35% in 2022. Meanwhile, Mamuju Regency ranks fourth highest with a prevalence of 33.8%. With that in mind, this research discusses the role of the local government in Mamuju District, Mamuju Regency in reducing stunting. This research was conducted to find out how big the role of local government is in reducing stunting in order to create quality and sustainable human resources, especially considering that stunting is a chronic nutritional problem in children which can result in impaired growth and are more susceptible to non-communicable diseases when they become adults.

The research method used is descriptive qualitative research which describes how the efforts made by the government in handling Stunting are in accordance with the five (5) Pillars of the National Strategy to accelerate Stunting reduction as stipulated in Presidential Decree 72 of 2021 concerning Accelerating Stunting Reduction namely, (1) Increased commitment and vision leadership. (2) Improvement of behavior change communication and community empowerment. (3) increasing the convergence of Specific Interventions and Sensitive Interventions. (4) Improving food and nutrition security at the individual, family and community levels. (5) Strengthening and developing systems, data, information, research, and innovation.

The results of this study indicate that the role of the regional government in the Mamuju sub-district in carrying out the 5 pillars of the national strategy to accelerate the reduction of Stunting has been carried out as it should, but in fact this has not completely reduced the prevalence of Stunting which has actually increased every year.

Keywords : Role, Local Government, Stunting

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu tantangan dan masalah gizi secara global yang sedang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Ambitious World Health Assembly menargetkan penurunan 40% angka *Stunting* di seluruh dunia pada tahun 2025. Global Nutritional Report 2018 melaporkan bahwa terdapat sekitar 150,8 juta (22,2%) balita *Stunting* yang menjadi salah satu faktor terhambatnya pengembangan manusia di dunia. World Health Organization (WHO) menetapkan lima daerah subregio prevalensi *Stunting*, termasuk Indonesia yang berada di regional Asia Tenggara (United Nation, 2018). *Stunting* merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi fokus program pembangunan kesehatan pemerintah tahun 2015-2019 selain penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan , 2015).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka *Stunting* sangat tinggi pada balita. Sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami *Stunting* (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2013). Menurut (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017) *Stunting* adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang anak/balita ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi

badan orang lain pada umumnya atau anak/balita yang seusianya (Sari & Montessori, 2021).

Malnutrisi kronis ini menjadi tanggung jawab besar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang menargetkan angka *Stunting* menjadi 14% pada akhir masa pemerintahannya. Secara nasional, angka prevalensi *Stunting* masih sebesar 24,4%, jauh di atas batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 20% (kemdikbud.go.id, 14 April 2022). Bukan hanya sekedar kuantitas target, komitmen percepatan penurunan *Stunting* didasari pemahaman bahwa permasalahan *Stunting* adalah masalah yang serius (Rahmadhita, 2020).

Penjelasan *Stunting* Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). (Saputri, 2019) Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek (*Stunting*). Balita *Stunting* (Tinggi Badan per Umur):

1. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi *Stunting* di Indonesia mencapai 37,2 %
2. Pemantauan Status Gizi Tahun 2016, mencapai 27,5 % ▪ Batasan WHO < 20%
3. Hal ini berarti pertumbuhan yang tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia, atau 1 dari 3 anak Indonesia mengalami *Stunting*
4. Lebih dari 1/3 anak berusia di bawah 5 tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata (Silpia, 2019).

Terkait kebijakan penanggulangan *Stunting* di Indonesia, Kemenkes memperluas wilayah lokus untuk pelaksanaan intervensi. Tahun 2020 akan melingkupi 260 Kab/Kota yang terus diperluas hingga sasaran seluruh kabupaten di tahun 2024. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menurunkan prevalensi *Stunting* menjadi 14% pada tahun 2024.

Pemerintah telah mengucurkan anggaran, baik melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga, maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan alokasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk penurunan angka *Stunting* melalui TKDD mencapai Rp76,2 triliun. Sebuah anggaran yang tidak sedikit.

Selain upaya penurunan dari pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan *Stunting* secara terarah di semua tingkatan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan dan Desa. Pada tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 yang menetapkan pedoman penggunaan dana transfer untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *Stunting*.

Sejalan dengan Kemenkeu, Kemendes juga telah memasukan pencegahan *Stunting* sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020. Di samping itu, untuk memberikan penekanan pada setiap desa dalam penggunaan dana desa untuk

pengecehan *Stunting*, Kemenkeu menetapkan salah satu dokumen persyaratan pengajuan pencairan dana desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni laporan konvergensi pengecehan *Stunting* tingkat desa. Pemerintah Daerah berperan sangat penting, terutama sebagai ujung tombak dalam penurunan program *Stunting*. Sebagai masalah multidimensional, *Stunting* butuh penyelesaian yang multi sektoral, sehingga Pemerintah Daerah perlu memahami, mengenali, dan berkomitmen untuk menyusun strategi dalam memerangi permasalahan *Stunting*.

Salah satu strategi menangani *Stunting* adalah optimalkan peran Posyandu, yang memiliki kedekatan erat dengan kehidupan warga di setiap daerah. Posyandu bisa memainkan peran sebagai pusat edukasi, pusat informasi, pusat penyaluran (tambahan makanan/minuman vitamin dan bergizi) bagi orang tua dan balita-nya, dimana pembiayaan dibebankan pada APBD maupun DD.

Usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menurunkan angka prevalensi *Stunting* juga berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) periode 2018-2024, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam Perpres ini diatur mengenai strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*; penyelenggaraan penurunan *Stunting*; koordinasi penyelenggaraan penurunan *Stunting*; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pendanaan (Ketut Aryastami & Tarigan, 2017).

Setiap tahunnya, Indonesia telah mengalami penurunan angka prevalensi *Stunting*. Akan tetapi, angka prevalensi *Stunting* saat ini masih jauh dari target 14% yang harus dicapai pada tahun 2024 atau sebanyak 5,33 juta balita yang masih mengalami *Stunting*. Pada tahun 2013, angka prevalensi *Stunting* berada pada angka 37,2%. Lima tahun berikutnya, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 30,8%. Pada tahun 2019, *Stunting* juga mengalami penurunan menjadi 27,7%. Oleh karena tidak ada pendataan, angka prevalensi *Stunting* di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan turun menjadi 26,92%. Penurunan angka tersebut diprediksi sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2019 (27,67%). Pada tahun 2021, angka prevalensi *Stunting* sebesar 24,4% (kemkes.go.id, 28 Desember 2021) (Teja, 2022).

Jika dilihat per provinsi, mengacu pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan prevalensi *Stunting* tertinggi, yaitu 37,8%. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), dan Sulawesi Tenggara (30,2%). Sementara jika dilihat per kabupaten, mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kabupaten dengan prevalensi balita *Stunting* tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (cnnindonesia.com, 23 Maret 2022).

Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilansir Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi "*Stunting*" anak Balita di Sulawesi Barat mencapai 39.7 persen. Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi di bandingkan dengan Provinsi lain di Indoensia, sehingga dipandang perlu untuk memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi pertumbuhannya. Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan anak, sehingga jika anak sehat tentu akan menyebabkan jiwanya juga sehat. Fakta lainnya, tingginya prevalensi anak *Stunting* telah memposisikan Sulawesi Barat ke dalam lima besar Provinsi masalah *Stunting* (Hamdan, 2022).

Masalah gizi, khususnya anak pendek menghambat perkembangan anak muda, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Studi yang ada menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Pada tahun 2021 pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penghargaan setelah berhasil menurunkan angka penderita

Stunting atau kekerdilan pada balita. penghargaan tersebut diberikan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu terlihat dari data laporan Riset Studi Gizi Indonesia, (SSGI) pada akhir tahun 2021. Sebelumnya angka prevelensi *Stunting* Sulbar berada di 40,03 persen di 2019, lalu menurun menjadi 33,8 persen di 2021. Meski demikian kasus *Stunting* di Sulawesi Barat masih yang tertinggi di Indonesia. Salah satu kabupaten yang ikut mengalami penurunan adalah Kabupaten Mamuju dimana mengalami penurunan 13,3 persen, sekarang capai 30,3 persen (Tirta, 2022).

Meskipun demikian Data *Stunting* di Indonesai tahun 2022 menyebutkan Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan pertama prevalensi Sunting tertinggi dengan nilai 23,1%. Dengan kata lain terdapat 22.903 jumlah balita yang mengalami *Stunting*. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian *Stunting* seperti gizi keluarga, pemilihan bahan makanan, status gizi ibu (Hanapi, 2022).

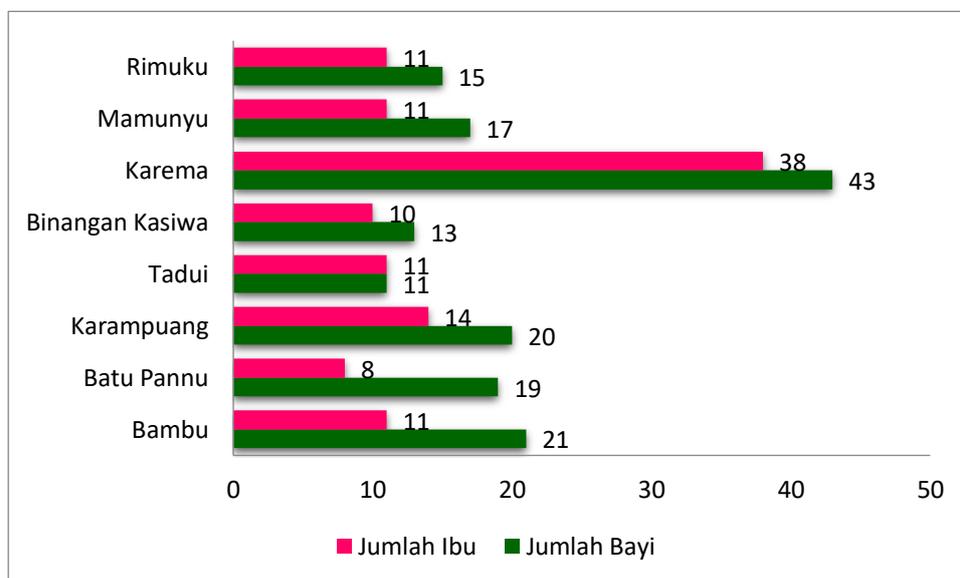
Salah satu lembaga yang turut serta dalam penurunan *Stunting* di pemerintah daerah khususnya Kabupaten Mamuju adalah Dinas Kesehatan yang telah melakukan berbagai program dalam penurunan *Stunting* salah satunya ialah rembuk *Stunting* sebagai salah satu dari delapan aksi dalam melaksanakan konvergensi *Stunting*. Rembuk *Stunting* ini merupakan wadah penyampaian hasil analisis situasi dan deklarasi komitmen Pemerintah Daerah serta permufakatan rencana kegiatan intervensi, dan juga mendorong komitmen publik dalam

upaya penurunan angka *Stunting* secara terintegrasi. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh semua pihak terkait dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Mamuju. Tidak hanya Dinas Kesehatan yang bertugas dalam menekan angka *Stunting* di Kabupaten Mamuju tetapi ada 146 peserta yang ikut andil dalam penurunan *Stunting* diantaranya, organisasi perangkat daerah terkait Provinsi Sulawesi Barat serta Kabupaten Mamuju, Camat dan Kepala Desa lokus *Stunting* se-Kabupaten Mamuju, Kepala Puskesmas lokus *Stunting* se-Kabupaten Mamuju, Dandim 1418 Kabupaten Mamuju, pengurus organisasi profesi bidang kesehatan, pengurus organisasi kemasyarakatan, serta media cetak dan elektronik. Dalam menekan angka *Stunting* di Kabupaten Mamuju pemerintah bahkan membentuk tim teknis percepatan pencegahan dan penurunan angka *Stunting* Kabupaten Mamuju, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mamuju menjadikan permasalahan *Stunting* masuk ke dalam prioritas yang harus terus ditekan agar tidak mengalami peningkatan (Mamuju, 2022).

Berkaitan hal tersebut sebenarnya pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju melakukan sosialisasi Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang peran Desa dalam penurunan *Stunting* di Kabupaten Mamuju, Tujuan kegiatan penyusunan perbup ini untuk melakukan integrasi sektor yang efektif dalam upaya pencegahan *Stunting* Dikabupaten Mamuju yang dihadiri sebanyak

130 peserta dari berbagai lintas sektor lainnya. Terkait peran Desa dalam penurunan *Stunting*, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Lembaga kemasyarakatan Desa Sabrianty Qadarsih mengatakan perbup ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes yang diantaranya bersumber dari Desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan *Stunting* ditingkat Desa juga memberikan kepastian hukum yang dapat di gunakan sebagai rujukan bagi Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *Stunting*, namun hingga saat ini perbup belum dirampungkan (Mamuju, 2020).

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IKBS St.Fatimah Mamuju yang berkolaborasi dengan Kader Posyandu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat menunjukkan dari 8 titik pelayan yang dibuka secara terperinci data bayi dan ibu sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Jumlah Bayi dan Ibu Per Titik Pelayanan

Data

persebaran *Stunting* di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Karema memiliki jumlah ibu dan balita terbanyak yaitu ibu sebanyak 38 orang dan balita 43 orang. Jumlah ibu yang paling sedikit ada di desa Batu Pannu, hanya ada 8 orang ibu dan jumlah balita dan bayi 19 orang. Rata-rata ibu yang datang membawa 2 anak mereka (Pengabdian et al., 2022).

Seluruh kelurahan di atas merupakan bagian dari kecamatan mamuju yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan kabupaten Mamuju, meskipun demikian *Stunting* masih tetap ada padahal seharusnya daerah yang dekat dari pusat pelayanan kesehatan apalagi daerah perkotaan idealnya mampu mengatasi masalah *Stunting* dengan baik.

Hal ini membuktikan bahwa persebaran penurunan kasus *Stunting* masih kurang maksimal dan perlu adanya penurunan secara intensif oleh para implementor. Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penurunan *Stunting* di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada keingintahuan terkait Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* di kecamatan mamuju Kabupaten Mamuju?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* di kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* di Kecamatan Mamuju

- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep dan teori mengenai pemerintah daerah dan *Stunting*.
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi peneliti, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam penurunan *Stunting*.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait peran pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* di Kecamatan Mamuju.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan memperbaiki pola asuh anak dalam rangka mencegah *Stunting*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah untuk dapat bersikap lebih aktif dalam menjalankan peran sebagai pemerintah daerah dalam penurunan *Stunting* khususnya di Kecamatan Mamuju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori – teori dari suatu konsep yang digunakan untuk memperjelas dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian. Teori – teori ini selanjutnya yang akan dijadikan sebagai batasan logis serta menjadi asumsi dasar terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah teori – teori yang diperuntukan dalam penelitian ini.

2.1. Konsep, Peran, Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

2.1.1. Konsep Pemerintah Daerah

Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara kesatuan membawa konsekuensi hadirnya lingkungan pemerintahan pusat (central government) dan lingkungan pemerintahan daerah (local government). Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Aristoteles mengklasifikasikan pemerintahan menurut lokus kedaulatan (sovereignty) yakni pada dasar siapa yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam membuat keputusan dalam sistem politik atau masyarakat. Klasifikasi kasar menyatakan bahwa pemerintahan bisa dipegang oleh satu orang, beberapa orang, dan banyak orang. Aristoteles mengatakan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan yang benar dan dinamakan polity bukan pemerintahan oligarki yang hanya dijalankan oleh beberapa orang.

Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran. Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda (Munawaroh, 2019).

Hal-hal wajib dari pemerintah daerah termasuk layanan yang terkait dengan hak untuk menanggapi kebutuhan, untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, yang harus memungkinkan tujuan pemerintahan mandiri daerah: langsung dari komunitas dapat dijangkau dan dialami

2.1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -Undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki fungsi ialah :

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Unsur-unsur dalam pemerintahan pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 kategori:

- a. Negara/Pemerintah, pada dasarnya mencakup aspek kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan lembaga kemasyarakatan.
- b. Swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi.
- c. Masyarakat, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

2.1.3. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23).

Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan

menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilakuseseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya,konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai

dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Menurut Meenakshisundaram (dalam, Jha dan Mathur, 1999: 60) menguraikan beberapa peran pemerintahan daerah (the roles of local government) yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Peran pemerintahan daerah yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menjadi senjata efektif dalam menghadapi tekanan lokal dengan menampung & mengartikulasikan kepentingan lokal, menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat yang merasakan langsung pelaksanaan fungsi pemerintah.
- b. Karena kedekatannya secara lokasi, dalam penyediaan pelayanan jasa bisa berlangsung lebih efisien
- c. Perencanaan dapat lebih baik karena lebih mengetahui kondisi lokalnya, dengan penggunaan tenaga lokal yang lebih efisien pula.
- d. Pejabat pemerintah bertanggung jawab lebih baik karena hubungan dengan publik lebih dekat.

e. Pemerintah daerah dapat menjadi medium komunikasi efektif antara pusat dengan masyarakat lokal terkait dengan program pemerintah pusat di daerah.

Terkait dengan peranan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik maka ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2007, maka pelayanan kesehatan termasuk urusan wajib pemerintah daerah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kerangka otonomi daerah maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Podungge, 2011). Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memberikan masukan tentang kualitas pelayanan yang mereka terima agar penentuan kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang memberikan

pelayanan (provider), tetapi ditentukan secara bersama-sama antara provider dengan user, customer, client, atau citizen sebagai komunitas masyarakat pengguna jasa pelayanan. (Supriyono, 2002).

2.2. Pemerintah Daerah Dalam Penurunan *Stunting*

2.2.1. Konsep *Stunting*

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak *Stunting* mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018). *Stunting* pada anak juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidakseimbangan fungsional (Anwar, Khomsan, dan Mauludyani, 2014).

Stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah lima tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan hingga awal bayi lahir, *Stunting* sendiri akan mulai nampak ketika bayi berusia dua tahun (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).

2.2.2. Dampak *Stunting*

Dampak *Stunting* dibagi menjadi dua, yakni ada dampak jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Jangka pendek kejadian *Stunting* yaitu terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan gangguan metabolisme pada tubuh. Sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu mudah sakit, munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, kegemukan, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua, dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat produktivitas menjadi rendah (Kemenkes RI, 2016). Berbagai permasalahan ini sangat mudah ditemukan di negara – negara berkembang seperti Indonesia (Unicef, 2007). *Stunting* pada anak yang harus disadari yaitu rusaknya fungsi kognitif sehingga anak dengan *Stunting* mengalami permasalahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. *Stunting* pada anak ini juga menjadi faktor risiko terhadap kematian, perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan ketidakseimbangan fungsional (Anwar dkk, 2014).

2.2.3. Faktor resiko *Stunting*

1) Status Gizi

Status Gizi merupakan sebuah penilaian keadaan gizi yang diukur oleh seseorang pada satu waktu dengan

mengumpulkan data (Arisman, 2005). Status gizi menggambarkan kebutuhan tubuh seseorang terpenuhi atau tidak.

2) Kebersihan Lingkungan

Sanitasi yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi (Kemenkes RI, 2018).

3) Makanan Pendamping ASI

Masalah kebutuhan gizi yang semakin tinggi akan dialami bayi mulai dari umur enam bulan membuat seorang bayi mulai mengenal Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang mana pemberian MP-ASI untuk menunjang penambahan sumber zat gizi disamping pemberian ASI hingga usia dua tahun.

4) ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan air susu yang dihasilkan seorang ibu setelah melahirkan. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan hingga usia bayi 6 bulan tanpa memberikan makanan atau minuman lainnya seperti susu formula, air putih, air jeruk kecuali vitamin dan obat (Kemenkes RI, 2016).

5) Berat Bayi Lahir Rendah

Berat bayi lahir rendah memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian *Stunting*. Dikatakan BBLR jika berat < 2500 gram (Kemenkes, 2010). Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian *Stunting* pada anak baduta.

6) Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga mampu meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi pada anak. Tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu penyebab terjadinya *Stunting* hal ini dikarenakan pendidikan yang tinggi dianggap mampu untuk membuat keputusan dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak (Adriani, 2012).

7) Pendapatan Orang Tua

Tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian *Stunting*. Hal ini dikarenakan keluarga dengan pendapatan yang rendah akan mempengaruhi dalam menyediakan pangan untuk keluarga.

8) Penyakit Infeksi Diare

Penyakit infeksi diare ini sering diderita oleh anak, seorang anak yang mengalami diare secara terus menerus akan berisiko untuk mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan sehingga penyakit infeksi tersebut dapat membuat anak kehilangan nafsu makan dan akan membuat penyerapan nutrisi menjadi terganggu (Kemenkes RI, 2011).

9) Pola Pemberian Makan

Pola asuh pemberian makan yang sesuai dengan anjuran KEMENKES RI 2016, yaitu pola makan pemberian makan yang baik kepada anak adalah dengan memberikan makanan yang memenuhi kebutuhan zat gizi anaknya setiap hari.

10) Jenis Kelamin Balita

Salah satu penelitian di Kota Semarang yang dilakukan oleh Setyawati (2018) menunjukkan bahwa anak balita laki – laki lebih banyak mengalami *Stunting* dibandingkan dengan balita perempuan hal ini dikarenakan perkembangan motorik kasar anak laki – laki lebih cepat dan beragam sehingga membutuhkan energi lebih banyak, sehingga risiko menjadi lebih tinggi jika pemenuhan kebutuhan energi tidak terpenuhi dengan baik (Ramadhani, 2020).

2.2.4. Peran Pemerintah Dalam Penurunan *Stunting*

Kebijakan penanggulangan *Stunting* di Indonesia, Kemenkes memperluas wilayah lokus untuk pelaksanaan intervensi. Tahun 2020 akan melingkupi 260 Kab/Kota yang terus diperluas hingga sasaran seluruh kabupaten di tahun 2024. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menurunkan prevalensi *Stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Pemerintah telah mengucurkan anggaran, baik melalui mekanisme belanja

kementerian/lembaga, maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan alokasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk penurunan angka *Stunting* melalui TKDD mencapai Rp76,2 triliun. Sebuah anggaran yang tak sedikit.

Kini, di tahun 2021 anggaran yang diperuntukkan bagi penurunan angka *Stunting* tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp86,2 triliun. Kenaikan anggaran tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menekan angka *Stunting* di 2024 mendatang. Selain upaya penurunan dari pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan *Stunting* secara terarah di semua tingkatan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan dan Desa. Pada tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 yang menetapkan pedoman penggunaan dana transfer untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *Stunting*.

Sejalan dengan Kemenkeu, Kemendes juga telah memasukan pencegahan *Stunting* sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020. Di samping itu, untuk memberikan penekanan pada setiap desa

dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan *Stunting*, Kemenkeu menetapkan salah satu dokumen persyaratan pengajuan pencairan dana desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat desa. Laporan yang disampaikan sebagai syarat pencairan dana desa tahap II tersebut, sekaligus sebagai bentuk monitoring atas penggunaan dana desa dalam pencegahan *Stunting* (Ananda, 2022).

Peran pemerintah daerah dalam aksi penurunan *Stunting* terintegrasi menurut kementerian dalam negeri Republik Indonesia bahwa penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintah dan masyarakat. Adapun peran pemerintah daerah dalam hal ini diantaranya ialah:

- 1) Peran pemerintah provinsi, antara lain :
 - a) Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
 - b) Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam

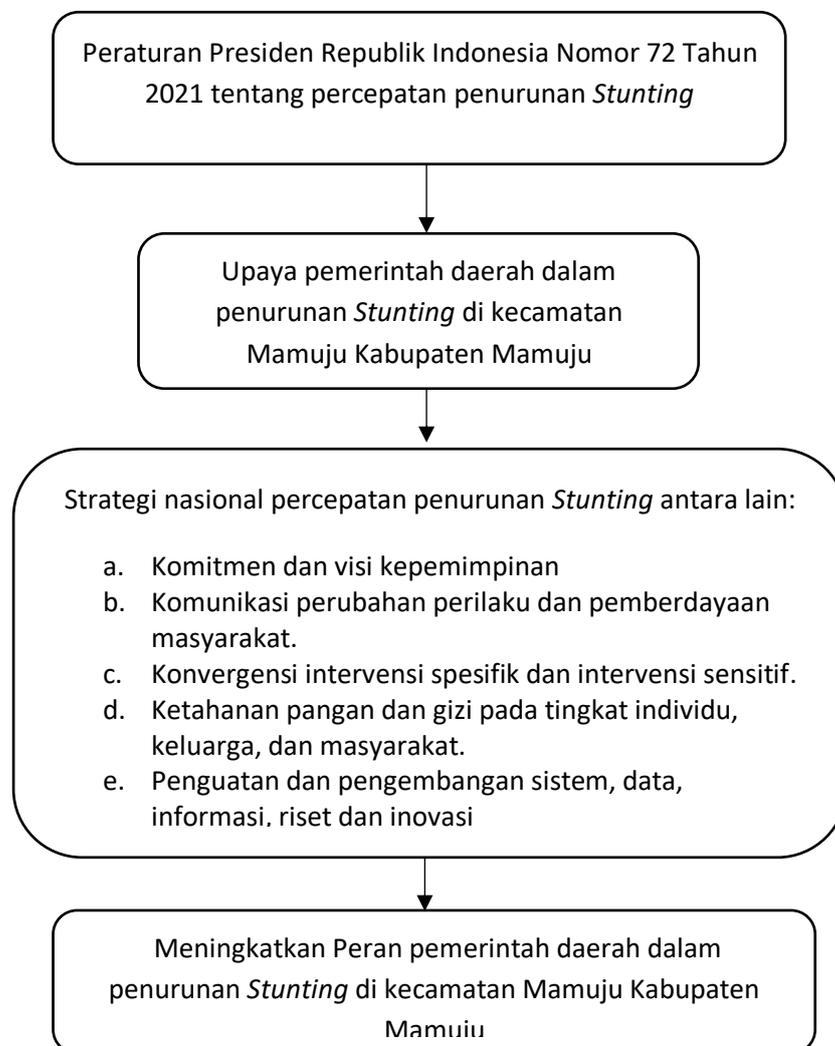
penyelenggaraan Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien.

- c) Mengkoordinir pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung Aksi Konvergensi percepatan pencegahan *Stunting*.
 - d) Membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan *Stunting*, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas provinsi yang bersangkutan.
- 2) Peran pemerintah kabupaten/kota, antara lain :
- a) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas khususnya dilokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi.
 - b) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
 - c) Mengkoordinir kecamatan dan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan

pemutahiran data (Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2021).

2.3. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep